

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Negara Indonesia sekarang telah memasuki era bonus demografi yaitu di mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2030, masuk nya pada era tersebut akan membuka peluang untuk menikmati bonus demografi (demographic deident) menurut (Badan Pusat Statistik, 2022). Dilihat dari hasil sensus penduduk tahun 2020 di Indonesia menunjukkan kenaikan pada usia 15-64 tahun yaitu usia produktif. Pada tahun tersebut jumlah penduduk usia produktif mencapai 70,72% dari total keseluruhan penduduk. Presentase kenaikan tersebut meningkat dari hasil sensus penduduk tahun 2010 yaitu presentase penduduk usia produktif sebesar 66%. Melonjaknya penduduk pada usia produktif akan menyebabkan berkurangnya nilai angka ketergantungan penduduk. Menurut Todaro (2011) bonus demografi di lihat dari jumlah rasio ketergantungan yaitu di bawah 50% (Maryati, 2015).

Menurut Ramdani (2013) banyaknya penduduk pada usia produktif di Indonesia bisa dijadikan mesin pertumbuhan ekonomi negara yang berkelanjutan atau bisa juga sebaliknya yaitu menjadi sumber munculnya konflik sosial (Maryati et al., 2021). Artinya jika tidak bisa memanfaatkannya bonus demografi menjadi sebuah bencana pada wilayah tersebut, namun jika bisa di manfaatkan dengan baik merupakan peluang yang bagus (Achmad & Sutikno, 2020).

Syarat tercapainya bonus demografi yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, terserapnya sumber daya manusia tersebut ke pasar kerja, adanya tabungan rumah tangga, dan meningkatnya kontribusi perempuan dalam pasar kerja (Heri et al., 2022). Jika rasio ketergantungan rendah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sedangkan jika rasio ketergantungan tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat (Panggabean, 2020)

Masalah penyerapan tenaga kerja masih menjadi momok menakutkan bagi pemerintah dan merupakan salah satu masalah yang susah untuk di selesaikan. Hal itu terjadi karena jumlah masyarakat pada usia produktif belum mampu atau belum mendapatkan pekerjaan dan sebaliknya lapangan pekerjaan itu sendiri juga belum meningkat untuk bisa memenuhi kebutuhan para masyarakat yang termasuk angkatan kerja tersebut. Semakin banyak angkatan kerja juga akan mengakibatkan persaingan antar individu dalam mendapatkan pekerjaan, keunggulan serta keterampilan dan juga pengetahuan menjadi modal penting bagi individu tersebut untuk mendapat pekerjaan dan yang tidak bisa bersaing tidak akan mendapat pekerjaan kemudian menjadi pengangguran.

Topik ini membuat semakin menarik di bahas selain karena pemaparan di atas namun juga karena saat ini kita sudah memasuki era yang seharusnya sudah menikmati bonus demografi. Dan juga pada tahun 2022 Provinsi Jawa Tengah termasuk kedalam urutan Provinsi yang jumlah penduduk nya paling

banyak di Indonesia, yaitu urutan ke 3 di bawah Jawa Timur dan di atas Sumatra Utara.

Tabel 1. 1 Presentase Kenaikan Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Tahun	Kenaikan Jumlah Penduduk (persen)
2019	0,32
2020	2,55
2021	0,3
2022	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa tengah, 2019-2022, diolah

Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa di Provinsi Jawa Tengah peningkatan *total population* terjadi di setiap tahun nya. Peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sejumlah 36.516.00 jiwa meningkat menjadi 36.742.500 jiwa, dan kemudian pada tahun 2022 meningkat juga menjadi 37.032.400 jiwa. Namun peningkatan terbesar terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu pada tahun 2019 sejumlah 34.552.500 jiwa dan pada tahun 2020 menjadi 36.516.000 jiwa. Meningkatnya jumlah penduduk tersebut harapannya pemerintah Provinsi Jawa Tengah bias memanfaatkan nya untuk dapat menghasilkan produksi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dengan cara meningkatkan kualitas penduduknya tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga harus memikirkan penambahan lapangan pekerjaan seiring dengan peningkatan

jumlah penduduk agar tidak menjadikan masalah seperti pengangguran yang meningkat.

Tabel 1. 2 Jumlah Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (jiwa)
2019	17.602.917
2020	17.536.935
2021	17.835.770
2022	18.390.459

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa tengah, 2019-2022, diolah

Tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan tiap tahun nya, hanya pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019 sejumlah 17.602.917 jiwa turun menjadi 17.536.935 jiwa. Hal ini berbanding terbalik dari jumlah peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di tahun 2019 ke tahun 2020. Pada penyerapan tenaga kerja justru mengalami penurunan, namun pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 meningkat sebanyak 17.835.770 jiwa, dan pada tahun 2022 juga meningkat sejumlah 18.390.459 jiwa. Di lihat dari tabel di atas bahwa Provinsi Jawa Tengah sudah cukup baik dalam menyerap tenaga kerja karena penyerapan tenaga kerja secara konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Namun masih perlu di ingat bahwa terdapat juga penurunan penyerapan tenaga kerja di tahun 2020, sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus terus meningkatkan sumber daya manusia nya sehingga sumber daya manusia tersebut lebih berkualitas dan tak lupa pemerintah harus

menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi di era bonus demografi ini.

Tabel 1. 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi (I), Jumlah Industri (JI) di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2020-2022)

Tahun	Investasi (Triliun rupiah)	Jumlah Industri (Unit)	Indeks Pembangunan Manusia (persen)
2020	50,24	4467	71.87
2021	52.71	4207	72.16
2022	68,41	4235	72.79

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa tengah, 2020-2022, diolah

Investasi merupakan salah satu komponen krusial dalam meningkatkan kapasitas produksi maupun jumlah industri. Menurut Sukirno (1994) meningkatnya investasi ini do pengaruhi oleh permintaan terhadap hasil produksi, permintaan yang terjadi di pasar memiliki dampak signifikan pada jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi. Tujuan dari investasi adalah untuk mengoptimalkan produksi total dalam suatu periode tertentu, dan volume investasi yang dilakukan memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, sedangkan kurangnya investasi dapat menyebabkan tingginya angka pengangguran (Dwi & Djohan, 2015). Investasi akan menambah kesempatan kerja kemudian mengakibatkan pendapatan masyarakat bertambah. Hal itu akan memperbesar konsumsi masyarakat sehingga produsen akan menambah lagi hasil produksinya yang tentunya membutuhkan tenaga kerja yang lebih juga. Berdasarkan tabel di atas jumlah investasi di Provinsi Jawa Tengah terus meningkat tiap tahun nya.

Upaya untuk meningkatkan peluang pekerjaan dapat dilakukan melalui pengembangan sektor industri. Sektor industri memiliki dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, karena semakin banyak industri yang ada, maka akan semakin banyak peluang pekerjaan yang terbuka. Namun, dalam tabel di atas terlihat penurunan jumlah industri di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Menurut Kementerian Keuangan pada tahun 2021, penyebaran pandemi ini memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas secara luas. Hal tersebut mengakibatkan melemahnya perekonomian serta menyebabkan banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan yang berdampak kepada banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Indeks pembangunan manusia yaitu gabungan atau komposisi yang terdiri dari 3 faktor yaitu pendidikan, standar hidup manusia serta kesehatan (Setiawan & Hakim, 2002). Indeks tersebut merupakan aspek yang memiliki dampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah. Sumber daya manusia berkualitas bisa didapat dengan cara meningkatkan pendidikan dan ketrampilan, sumber daya manusia yang berkualitas tentu akan memudahkan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2020 sampai 2022 indeks pembanguana manusianya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 indeks pembangunan manuisa di Provinsi Jawa Tengah sebesar 71.87 persen kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 72.16 persen dan juga pada tahun 2022 masih meningkat menjadi sebesar 72.79 persen. Terus meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia tentunya di karenakan beberapa faktor seperti upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, perbaikan sistem kesehatan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pengembangan infrastruktur yang memadai seperti transportasi yang baik ataupun listrik dan juga konektivitas telekomunikasi yang baik, dan juga peningkatan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, hal tersebut termasuk dalam strategi dan kebijakan yang di lakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. 4 Angkatan Kerja (AK), Upah Minimum (UMP), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2020-2022)

Tahun	Angkatan Kerja (jiwa)	Upah Minimum (rupiah)	PDRB (rupiah)
2020	18.751.277	1.742.015	1.347.222.485.020.000
2021	18.963.993	1.798.979	1.419.986.618.490.000
2022	19.474.934	1.813.011	1.560.899.018.080.000

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa tengah, 2020-2022, diolah

Angkatan Kerja yaitu masyarakat yang sudah memasuki usia produktif, yaitu 15-64 tahun yang sudah bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan kedua itu termasuk kedalam angkatan kerja. Dalam tabel di atas jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sejumlah

18.751.277 jiwa, kemudian pada tahun 2021 meningkat sejumlah 18.963.993 jiwa, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi sejumlah 19.474.934 jiwa. Peningkatan terbanyak terjadi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 510.941 jiwa, peningkatan tersebut terjadi karena beberapa faktor yang salah satunya perubahan demografi. Perubahan demografi tersebut seperti meningkatnya jumlah generasi muda yang sudah masuk usia kerja dan termasuk golongan angkatan kerja, mestinya hal tersebut membuat angkatan kerja semakin bertambah. Dan juga saat ini sudah memasuki era bonus demografi dimana hal tersebut berkaitan langsung dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja.

Penetapan upah minimum adalah salah satu aspek yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja, dan di Indonesia, upah minimum ini secara terus-menerus mengalami kenaikan karena berfungsi sebagai standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah daerah dalam menetapkan upah minimum regional. Faktor faktor yang menyebabkan peningkatan upah minimum yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, tuntutan serikat pekerja, produktivitas, dan standar hidup dan kesejahteraan yang meningkat. Banyaknya upah minimum di setiap daerah berbeda-beda. Berdasarkan tabel di atas upah minimum Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.742.015 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.798.979 kemudian pada tahun 2022 juga meningkat menjadi sejumlah Rp. 1.813.011

Faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja lainnya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan PDRB yang kuat seringkali berhubungan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ketika perekonomian suatu daerah atau negara berkembang, perusahaan-perusahaan akan banyak membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Dari tabel di atas PDRB Provinsi Jawa Tengah selalu mengalami peningkatan, pada tahun 2020 jumlah PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.347.222.485.020.000, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.419.986.618.490.000, dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi sejumlah Rp. 1.560.899.018.080.000. Peningkatan jumlah PDRB tersebut bisa disebabkan beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan juga perkembangan infrastruktur.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengembangkan faktor-faktor yang diyakini mampu mempengaruhi penyerapan tenaga kerja meliputi, Investasi, Jumlah Industri, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angkatan Kerja, Upah minimum dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sehingga judul penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah **“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Memasuki Era Bonus Demografi di Jawa Tengah Tahun 2020-2022”**

1.2 Batasan Masalah

Penelitian akan berfokus sepenuhnya pada mengidentifikasi hambatan yang terkait dengan topik penelitian yang akan dijelaskan. Indikator-indikator yang akan dianalisis untuk memahami dampaknya terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dalam penelitian ini mencakup investasi, jumlah industri, indeks pembangunan manusia (IPM), angkatan kerja, upah minimum, dan produk domestik regional bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah. Rentang waktu yang akan dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah dari tahun 2020 hingga 2022.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Industri terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh Angkatan Kerja terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

6. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh Investasi terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui pengaruh Jumlah Industri terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4. Mengetahui pengaruh Angkatan Kerja terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap penyerapan tenaga kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Bagi peneliti

Harapannya, hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga bagi para peneliti dalam memahami aspek-aspek penyerapan tenaga kerja, baik dari perspektif ekonomi maupun sosial. Diharapkan

bahwa penelitian ini akan merangsang minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut di kalangan akademisi.

2. Bagi Keilmuan

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi tambahan dan memperluas wawasan tentang penyerapan tenaga kerja dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi, serta menggali topik penelitian yang berbeda dengan subjek dan objek yang bervariasi.

3. Bagi Praktik/Pemerintah/Lembaga terkait

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan panduan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait penyerapan tenaga kerja dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan. Diharapkan bahwa kebijakan yang disusun dengan baik dapat mengatasi atau mengurangi permasalahan yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja.